

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

RAUHUL IJTIHAD¹⁾, IWAN HARSONO²⁾*

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram

¹⁾*rauhulijtihad@gmail.com*, ²⁾*iwanharsono@unram.ac.id* (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKAD). Penelitian ini bersifat kuantitas dengan jenis data berupa data dokumenter. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKAD) dengan periode pengamatan pada tahun 2011-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 110 data. Penelitian ini dianalisis dengan regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Kemandirian Daerah dan Efektifitas Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sebaliknya Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kata kunci: *Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of independence, effectiveness of local original income and regional expenditure on regional financial performance at the Regional Finance and Asset Management Agency of West Nusa Tenggara Province (RFAMA). This research is quantity with the type of data in the form of documentary data. The population used in this study is all regencies and cities in East Java Province consisting of 2 cities and 8 regencies contained in the Regional Finance and Asset Management Agency of West Nusa Tenggara Province (RFAMA) with an observation period in 2011-2021. The sampling technique in this study is a purposive sampling technique with a sample number of 110 data. The study was analyzed by simple linear regression using the SPSS program. The results of this study show that Regional Independence and Regional Revenue Effectiveness do not affect Regional Financial Performance, on the contrary, Regional Expenditure has a positive effect on Regional Financial Performance.

Keywords: *Regional Independence Ratio, Regional Original Revenue Effectiveness, Regional Expenditure Management, Regional Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya (Mulyanto et al., 2021). Kesehatan suatu wilayah dapat sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik; ini dapat membuat wilayah tersebut lebih kuat dan berdaya dibandingkan dengan wilayah lain. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah, intervensi antara pemerintah daerah dan pusat harus dilakukan, dan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah kota dan daerah serta sumber daya manusia mereka. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka.

Selain pajak daerah, amanat daerah, pendapatan daerah mandiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, pajak sendiri merupakan sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Dengan daerah yang semakin bersih, pemerintah harus mampu memaksimalkan pendapatannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penting untuk penilaian bundaran dan diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan biaya kesepakatan (Mardiasmo 2019). Hampir semua kebutuhan hidup masyarakat Indonesia adalah barang-barang yang bergantung pada pajak saat diangkut. Setiap orang, terlepas dari Nomor Pokok Wajib Warga Negara (NPWP), bergantung pada pajak dan wajib membayar pajak sambil mengonsumsi tenaga dan produk. Tentu saja, biaya dari individu akan dikembalikan ke individu melalui peningkatan sesuai kemampuan realokasi pendapatan biaya. (Darmawan, I., Harsono, I., et al., 2023).

Harsono, I., et al., (2023) menyebutkan Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui otonomi, seperti halnya dengan desentralisasi fiskal berupa ketersediaan sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan secara mandiri. Hal ini dapat diartikan berpotensi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pandangan konseptualnya menggambarkan bahwa mengukur kemandirian daerah dapat dilakukan dengan mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber tersebut dari pajak daerah, retribusi, hasil milik daerah perusahaan, dan pengolahan aset terpisah lainnya serta pendapatan daerah yang sah.

Untuk mencapai otonomi, pendapatan daerah yang sah dikelola oleh daerah dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Jumlah pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan seberapa baik usaha mereka berhasil dan seberapa baik mereka dapat membiayai pembangunan dan pemerintahan nasional. Sebab pemerintah pusat dan daerah sangat mengutamakan pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah tidak akan berhasil meskipun pendapatannya meningkat ini karena pemerintah pusat dan daerah sangat mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan jumlah fasilitas publik yang tersedia, pembangunan sarana dan prasarana berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Arwati dan Hadiati 2013).

Pengalokasian anggaran untuk setiap daerah sebaiknya didasarkan pada kebutuhan setiap daerah yang sangat membutuhkan anggaran. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah adalah salah satu faktor yang menunjukkan seberapa pentingnya penyediaan sarana dan prasarana. Daerah dengan wilayah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk melayani warganya dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, ketimpangan fiskal terjadi di antara daerah, dan pemerintah memberikan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional). Pendapatan asli daerah efektif menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan asli daerah berdasarkan potensi aktual dan direncanakan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2012).

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang terdiri atas dua pulau yakni pulau Lombok dan pulau Sumbawa, Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat bersamaan dengan 8 kabupaten dan 2 kota yang telah menjalankan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar melaksanakan fungsi serta peranannya dengan didasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah diartikan sebagai sebuah tantangan dikarenakan daerah berusaha untuk membuktikan kemandiriannya (Firmansyah, Harsono, I., et al., 2023).

Harsono, I., et al., (2023) Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pembangunan, dan upah minimum daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan upah minimum daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, dan Belanja pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif. PAD tidak mempengaruhi pengangguran. Belanja pembangunan dan daerah upah minimum secara signifikan dan positif mempengaruhi pengangguran.

Adi (2006) tentang kemandirian daerah, tingkat kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh total pendapatan menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan volume investasi, dan meningkatkan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa kemandirian daerah berdampak positif pada kinerja keuangan.

Nugroho dan Rohman (2012) mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berimplikasi pada kinerja keuangan daerah sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Anzar sari (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar efektivitas pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Yulia dan Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana belanja daerah yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal tersebut berarti pengelolaan belanja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Firmansyah, Harsono, I., et al., (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pengujian secara simultan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Rumusan Masalah

1. Apakah Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan Daerah?
2. Apakah Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan Daerah?
3. Apakah Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan Daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap kinerja Keuangan Daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap kinerja Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data. Populasi adalah kumpulan besar orang yang memiliki kualitas dan atribut tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian mereka membuat kesimpulan tentang temuan penelitian (Ghozali, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan standar tertentu. Kriteria sampel adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten dan Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2011-2021; dan (2) Kabupaten dan Kota yang melaporkan Realisasi Anggaran selama periode 2011-2021 secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada. Ini menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan nilai maksimum dan minimum, serta jumlah data (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melakukan pengujian. Analisis regresi linear berganda adalah jenis penelitian yang menyelidiki bagaimana variabel dependen bergantung pada satu atau lebih variabel independen dan berusaha untuk menghitung atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen sebelumnya. Persamaan yang digunakan untuk analisis ini adalah sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1 RKD + \beta_2 EPAD + \beta_3 PBD + e$$

Dimana:

KKD : Kinerja Keuangan Daerah

α : Konstanta

RKD : Rasio Kemandirian Daerah

EPAD : Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

PBD : Pengelolaan Belanja Daerah

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

e : error

Model ini digunakan untuk melakukan Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas dan Uji Kelayakan Model: Uji R², Uji F, Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Propinsi Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2021. Nusa Tenggara Barat terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota secara administratif. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah dari tahun 2011 hingga 2021, yang dicatat di BPKAD, dengan memperhatikan pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Tabel kriteria pengambilan sampel berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	2011	2013	2015	2017	2019	2021
1	Kabupaten dan Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2011-2021	20	20	20	20	20	10
2	Kabupaten dan Kota yang tidak melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	0
3	Kabupaten yang melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	16	16	16	16	16	8
4	Kota yang melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	4	4	4	4	4	2
Jumlah Sampel							110

Sumber: BPKAD NTB, 2021

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RKD	110	.00	2.00	1.0273	.53259
EPAD	110	.00	34.00	1.6455	3.45770
PBD	110	.00	39.00	2.6909	5.57805
KKD	110	1.00	40.00	2.7545	5.65878
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif pada rasio kemandirian daerah menunjukkan jika nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 2,00 dengan nilai mean sebesar 1,0273 dan standar deviasi sebesar 0,53259. Nilai minimum terjadi pada seluruh Kabupaten dan Kota di tahun 2011, dalam hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 memiliki tingkat peran pemerintah pusat yang lebih dominan daripada tahun yang lain. Namun, nilai maksimum terjadi pada Kota Mataram di tahun 2013, 2015 dan 2019-2020 yang menunjukkan jika tingkat kemandirian telah optimal dan tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya.

Analisis statistik deskriptif tentang efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 34,00, dengan nilai mean sebesar 1,6455 dan nilai standar deviasi sebesar 3,45770. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012 dan Lombok Utara pada tahun 2020 memiliki tingkat efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara. Hasil statistik deskriptif selanjutnya pada pengelolaan belanja daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum 39,00 dengan mean sebesar 2,6909 dan standar deviasi sebesar 5,57805. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Bima di tahun 2018 dan 2020, Sumbawa Barat tahun 2021 dan Lombok Utara tahun 2012 hal ini menunjukkan tiga Kabupaten tersebut memiliki pengelolaan belanja daerah paling rendah dibanding Kabupaten atau Kota lainnya. Namun, nilai maksimum terjadi pada Kota Bima pada tahun 2011 yang menunjukkan jika tingkat dalam pengelolaan belanja daerah lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya dan dapat mengelola belanja daerah dengan optimal.

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum 40,00 dengan nilai mean sebesar 2,7545 dan standar deviasi sebesar 5,65878. Nilai minimum terjadi pada seluruh Kabupaten Kota di tahun 2012-2020, hal itu menunjukkan jika Kabupaten Kota pada tahun tersebut memiliki nilai kinerja keuangan yang rendah dibanding tahun yang lainnya. Namun nilai maksimum terdapat pada Kota Bima di tahun 2011 yang menunjukkan jika Kota Bima memiliki nilai yang paling tinggi dalam kinerja keuangan dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya.

Statistik Inferensial Spesifikasi Model

Dalam penelitian ini spesifikasi model berguna untuk menguji apakah variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja keuangan daerah. Pengujian didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil pengolahan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.198	.480		2.494	.014		
RKD	-.935	.373	-.088	-2.506	.014	.677	1.477
EPAD	.032	.047	.020	.682	.497	.997	1.003
PBD	.916	.036	.903	25.684	.001	.676	1.479

a. Dependent Variable: KKD

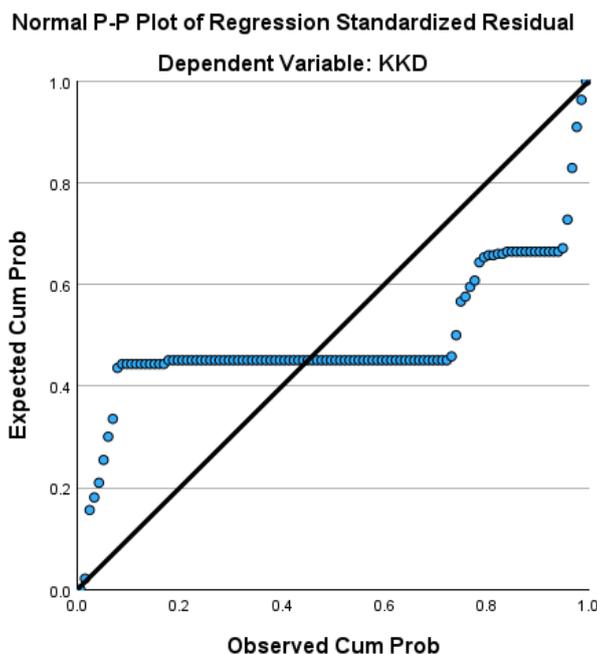
Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Dari hasil tabel persamaan analisis regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa model analisis adalah sebagai berikut

$$: KKD = 1,198 + -0,935RKD + 0,032 EPAD + 0,916PBD + e$$

Persamaan diatas dapat di interpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 1,198, karena konstanta yang positif menunjukkan bahwa semua variabel independen dianggap konstan, maka kinerja keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.198. Nilai koefisien regresi variabel Rasio Kemandirian Daerah sebesar -0,935, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,032 dan Pengelolaan Belanja daerah sebesar 0,916 dimana koefisien bertanda positif, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Pengelolaan Belanja daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Daerah sedangkan Rasio Kemandirian Daerah bernilai negative menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak searah dengan variabel Kinerja Keuangan Daerah.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil uji Normalitas
Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada grafik *Probability plot* dapat dikatakan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan jika data yang digunakan pada penelitian ini telah terdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		110	
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.68355490	
Most Extreme Differences	Absolute	.362	
	Positive	.281	
	Negative	-.362	
Test Statistic		.362	
Asymp. Sig. (2-tailed)^c		<.001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)^d	Sig.	<.001	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas, nilai kolmogorov Test Statistic sebesar 0,362 dengan tingkat signifikan 0,001, maka hal itu menunjukkan jika variabel penelitian tidak berdistribusi normal karena tingkat signifikasinya $0,001 < 0,005$ sehingga rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah dan kinerja keuangan daerah berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang terdapat pada model regresi. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Durbin-Watson (uji DW). yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 ^a	.911	.909	1.70721	1.649

a. Predictors: (Constant), PBD, EPAD, RKD

b. Dependent Variable: KKD

dL	dU	DW	4-dU	4-dL
1,6336	1,7455	1,649	2,2545	2,3664

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,649. Yaitu $1,6336 < 1,7455 < 1,649 < 2,2545 < 2,3664$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RKD	.677	1.477
	EPAD	.997	1.003
	PBD	.676	1.479

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Tabel 6 menunjukkan jika nilai *tolerance* ketiga variabel yaitu RKD sebesar 0,677, variabel EPAD sebesar 0,997 dan variabel PBD sebesar 0,676 Sedangkan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel yaitu variabel RKD sebesar 1,477, variabel EPAD sebesar 1,003 dan variabel PBD sebesar 1,479. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa angka *tolerance* diatas 0,1 dan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka antar variabel independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas

Uji Kelayakan Model

Uji R²

Pada penelitian terdapat analisis pada nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji R²
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 ^a	.911	.909	1.70721	1.649

a. Predictors: (Constant), PBD, EPAD, RKD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Dari hasil Tabel 7 menunjukkan jika nilai Adjusted R Square sebesar 0,909 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar .90,9%. Sedangkan sisanya 100% - 90,9%. = 10,1%. Hal ini menunjukkan masih jika variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model yang berguna untuk menguji apakah model regresi terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tabel ANNOVA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai Sig F < 0,05, maka menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam model penelitian ini. Hasil uji F yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3181.428	3	1060.476	363.853	.001 ^b
	Residual	308.945	106	2.915		
	Total	3490.373	109			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), PBD, EPAD, RKD

Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Dari Tabel 8, hasil pengolahan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 363,498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Dalam hal ini model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan karena memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis

Rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah diuji menggunakan hipotesis ini untuk menentukan apakah variabel-variabel ini mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Setelah itu, variabel independen dan variabel dependen diuji. Uji hipotesis ini dilakukan dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil uji t didasarkan pada kriteria berikut untuk membuat kesimpulan: nilai signifikansi uji t tidak lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen; sebaliknya, nilai signifikansi uji t lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen. Hasil uji hipotesis berikut:

Hasil Perhitungan Uji Hipotesis

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance			VIF	
1	(Constant)	1.198	.480		2.494	.014		
	RKD	-.935	.373	-.088	-2.506	.014	.677	1.477
	EPAD	.032	.047	.020	.682	.497	.997	1.003
	PBD	.916	.036	.903	25.684	<.001	.676	1.479

a. Dependent Variable: KKD

Gambar 2. Hasil Perhitungan Uji Hipotesis
Sumber: Data BPKAD Propinsi NTB diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 diatas menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah:

- (1) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar -2,506 dan tingkat signifikansi sebesar 0,014. Yang berarti bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t ini tidak mendukung hipotesis yang pertama bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
- (2) Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 0,682 dan nilai signifikansi sebesar 0,497. Yang berarti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t tidak mendukung hipotesis yang kedua.
- (3) Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 25,684 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Yang berarti bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang ketiga bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa t hitung sebesar -2,506 dengan nilai signifikan 0,014 lebih besar dari 0,005 dan nilai koefisien 0,373. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini ditolak. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang artinya tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini, variabel efektifitas pendapatan asli daerah berdampak positif pada kinerja keuangan daerah, berdasarkan hasil pengujian statistik. Tabel 9 menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,682, dengan nilai signifikan 0,497 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien 0,047. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada tingkat pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Pengelolaan Belanja daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini, variabel pengelolaan belanja daerah berdampak positif pada kinerja keuangan daerah, menurut hasil pengujian statistik. Tabel 9 menunjukkan bahwa t hitung adalah 25,684, dengan nilai signifikan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 0,036. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah diuntungkan oleh pengelolaan belanja daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Mimba (2016) dan penelitian yang dilakukan Pratama et al (2015) mengemukakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan, penelitian ini tidak mendukung yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2014) bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat, di antaranya: (1) Rasio kemandirian daerah tidak berdampak positif pada kinerja keuangan daerah; dalam hal ini, fakta bahwa rasio kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. (2) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa memiliki pendapatan asli daerah yang optimal tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. (3) Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin banyak pemerintah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel selain variabel yang telah digunakan oleh peneliti yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (2) Didalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan periode selama 10 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan memilih sampel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021* (Vol. 5, Issue 1).
- Al, Z. A., Harsono, I., & Wahidin. (2023). *Experimental Student Experiences Local Economic Development Strategy to Increase the Competitiveness of MSMEs in the Tembe Nggoli (Typical Bima Woven Cloth) Creative Business in Ntobo Village, Bima City Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM pada Usaha Kreatif Tembe Nggoli (Kain Tenun Khas Bima) di Kelurahan Ntobo Kota Bima*. <https://doi.org/10.58330/ese.v1i9.361>
- Astati, Y., Nyoman, D., & Mamba, N. P. S. H. (2016). *Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(1), 1924- 1950.
- Azhar, I. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164-174.
- Darmawan, Indra., Sahri, Harsono, I., & Irwan, M. (2023). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Firmansyah, F., Harsono, I., & Astuti, E. (2023). *Analysis of the Influence of Local Own Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure in West Nusa Tenggara*. 1, 2012–2021. <https://doi.org/10.58330/ese.v1i3.173>
- Harsono, I. (2013). *Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pendekatan Input Output)*.
- Harsono, I. (2023). *The Impact Of E-Money On Inflation In Indonesia*. *Ganec Swara*, 17(3) 1160-1164.
- Harsono, I., Muhammad, Fadlli, D., Muhamad Bai'ul Hak, Ali, & Hidayat, A. (2023). *Potential Leading Sector To Drive Economic Growth In West Nusa Tenggara Province Sektor Unggulan Potensial Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *AGRISEP*, 22(1). <https://doi.org/10.31186/jagrisep.22.1.249-268>
- Harsono, I., Purnamawati, I. G. A., & Demung, I. W. (2023). *Determinants of Economic Growth, Poverty, and Unemployment: A Path Analysis Study*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 359–366. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.63986>
- Judijanto, L., Harsono, I., & Santoso Budiwidjojo Putra, A. (2023). *Bibliometric Analysis of Human Resource Development: Trends, Research Focuses, and Recent Developments Article Info ABSTRACT*. In *West Science Journal Economic and Entrepreneurship* (Vol. 1, Issue 11).
- Mahmudi. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan 3. ANDI. Yogyakarta.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). *Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32–46.

- Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerin*. JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi). <https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90>
- Nasir dan Darlis. (2012). *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Al Fino Losa. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1 Sularso. H dan Restianto. Y. E. 2011.
- Nugroho, Akram Arif. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD Tahun 20018-2010*. Skripsi : Muhammadiyah Surakarta.
- Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti dan E. Sujana., (2015). *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. 3(1): 1-12
- Priyatno, Duwi. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rahmayati, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA, 1(1), 40–54
- Riristuningsia, D., Wahyunadi, & Harsono, I. (2017). Public Participation in Rural Development Planning (A Study in Lopok Village, Lopok District, Sumbawa Regency – West Nusa Tenggara). *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(1), 57–64. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p057>
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2).
- Septiani, Nanda. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Provinsi Se Kalimantan*. Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah.